

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Selama era reformasi pelaksanaan fungsi representasi Partai Golkar belum optimal dan berjalan fluktuatif, sehingga belum mampu mendorong terwujudnya *good governance*. Pada periode awal reformasi Partai Golkar mampu menjalankan fungsi representasinya dengan baik, sehingga banyak melahirkan kebijakan publik yang menjadi fondasi *good governance*. Namun pasca periode awal reformasi, Partai Golkar mengalami pelemahan dan cenderung pragmatis dan oligarkis. Namun demikian pada periode terakhir saat ini dinilai semakin membaik kembali, seiring dengan hadirnya berbagai kebijakan internal partai maupun kebijakan publik yang representatif.

Adapun belum optimalnya fungsi representasi Partai Golkar secara umum diakibatkan karena Partai Golkar masih terjebak demokrasi elektoral, belum otonom, tidak terbebas dari oligarki dan korupsi, dan representasi Anggota DPR Fraksi Partai Golkar masih lemah. Sedangkan secara khusus diakibatkan karena belum memiliki lembaga khusus artikulasi, lembaga penelitian, pengkajian, dan perumusan kebijakan publik atau agregasi, dan belum optimal menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan kredibel. Namun demikian Partai Golkar diyakini memiliki kapasitas untuk memperkuat fungsi representasinya dan mampu mewujudkan *good governance*, karena Partai Golkar dinilai memiliki SDM handal, berpengalaman, struktur merata dan *settle*, serta masih konsisten dengan nilai-nilai Keislaman, Kepancasilaan, dan Keindonesiaan.

Selama era reformasi tata kelola fungsi rekrutmen Partai Golkar juga belum optimal karena secara umum mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami pelemahan. Di awal reformasi Partai Golkar mampu menjalankan fungsi rekrutmen kekuasaan politik dengan baik sehingga mampu memenangkan pemilu legislatif tahun 2004. Pasca periode awal reformasi rekrutmen Partai

Golkar mengalami kemunduran dan pelemahan, sehingga perolehan kursinya semakin menurun. Namun demikian pada periode terakhir Partai Golkar dinilai mampu memperkuat fungsi rekrutmennya dengan hadirnya Golkar Institute.

Adapun penyebab khusus belum optimalnya fungsi rekrutmen Partai Golkar diakibatkan karena rekrutmen belum sepenuhnya demokratis dan inklusif, belum optimal menjalankan mekanisme sertifikasi berbasis nilai-nilai PDLT, belum memberlakukan mekanisme *fit and proper test*, cenderung dinastik, oligarkis, pragmatis dan transaksional. Partai Golkar juga dinilai tidak luput melakukan pendekatan *vote getter* (pendulang suara), belum memberlakukan mekanisme dukungan publik dari *civil society*, belum memberlakukan uji akuntabilitas publik untuk mengukur tingkat kepercayaan dan kesukaaan publik dan uji elektabilitas kandidat untuk mengukur tingkat popularitas dan keterpilihan kandidat.

Temuan model (*Model Findings*) tatakelola fungsi representasi yang menjadi gagasan dari penelitian ini adalah model **“Rumah Aspirasi Fungsional”**. Rumah Aspirasi Fungsional merupakan model institusi tatakelola Representasi Partai Golkar yang Amanah yang mampu mendorong terwujudnya *good governance*. Model Rumah Aspirasi Fungsional memiliki kriteria antara lain: memiliki visi dan misi kerakyatan dan kesejahteraan; terbuka, aspiratif dan responsif; konsen terhadap isu-isu publik; memiliki kekayaan ide dan terobosan kebijakan publik; menjalankan program yang mendekati dengan rakyat; dan memperkuat hubungan DPR dengan konstituen, DPR dengan struktur partai, serta partai dengan masyarakat. Rumah Aspirasi Fungsional menjalankan fungsi-fungsi representasi yaitu: *Pertama*, sebagai lembaga penyerapan dan pengelolaan aspirasi publik atau menjalankan fungsi artikulasi. *Kedua*, sebagai lembaga penelitian, pengkajian dan perumusan kebijakan publik atau menjalankan fungsi agregasi. *Ketiga*, menjadi Rumah Akuntabilitas Publik; dan *keempat*, menjadi Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Rumah Aspirasi Fungsional secara institusional dapat diberlakukan di wilayah Partai, Fraksi, maupun individu Wakil Rakyat, baik secara formal-non formal maupun digital.

Lembaga Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen Partai Golkar menjadi temuan model (*model findings*) penelitian ini. Secara fungsional Lembaga ini menjalankan tiga fungsi utama rekrutmen politik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu kaderisasi, edukasi, dan rekrutmen. Fungsi Kaderisasi dan Edukasi dijalankan berdasarkan investasi SDM, berjenjang, berkelanjutan dan terintegrasi, berbasis ideologi, terbuka, demokratis dan inklusif. Kaderisasi dilakukan dengan cara mengorganisir kaum millennial, tokoh mahasiswa, tokoh pemuda, dan tokoh pergerakan lainnya, serta menjalankan mekanisme pencarian bakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan rekrutmen dijalankan oleh Lembaga ini dengan tujuan untuk merekrut calon-calon pemimpin bangsa yang terjamin integritas, kapasitas, dan kapabilitasnya. Sehingga rekrutmen dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, demokratis dan inklusif, memberlakukan sertifikasi kelayakan dan kepatutan, memberlakukan mekanisme dukungan publik dari *civil society* dalam tahapan pencalonan, dan memberlakukan mekanisme uji akuntabilitas publik dan elektabilitas kandidat untuk menjamin kemenangan Partai Golkar. Dengan demikian Golkar Institute dapat diperkuat dan dikembangkan dengan menjalankan tiga fungsi kaderisasi, edukasi, dan rekrutmen secara terintegrasi. Bahkan Golkar Institute dapat dikembangkan menjadi Lembaga representasi sebagaimana model Rumah Aspirasi Fungsional.

Secara teoritis, semua gagasan model tersebut dirumuskan dalam sebuah kerangka teori “*good political party governance*” atau “Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Politik yang Amanah” sebagai temuan teori (*theoretical findings*) dan *novelty* penelitian ini. Rumusan teori ini menggabungkan tiga teori yaitu, teori representasi (Bartolini dan Mair, 2001; Szymanek, 2015), teori rekrutmen (Pippa Norris, 2006), dan teori *good governance* (Ishiyama, 2015). *Good Political Party Governance* merumuskan tiga fungsi utama Partai Politik yaitu fungsi representasi, fungsi rekrutmen, dan fungsi mewujudkan *good governance*.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini terdapat catatan penting dalam bentuk saran penulis terkait bagaimana merekonstruksi tata kelola fungsi representasi dan rekrutmen Partai Golkar agar mampu mewujudkan *good governance* di era reformasi, antara lain:

1. Partai Politik adalah organisasi milik publik bukan milik pribadi atau kelompok. Perlu ada revisi pasal 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan mempertegas bahwa yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi milik publik. Diksi “*untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara*” perlu dirubah menjadi “*untuk memperjuangkan kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan anggota*”. Sehingga Partai Politik bukan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok tetapi milik publik dan mendahulukan kepentingan negara, bangsa dan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Secara yuridis pragmatisme dan oligarki dalam rekrutmen kekuasaan diakibatkan karena ketidaktegasan Undang-undang Partai Politik dalam mengatur prinsip dan indikator rekrutmen yang demokratis. Sehingga diperlukan revisi pasal 29 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik harus secara rigid dan rinci mengatur prinsip-prinsip dan indikator demokratis dan tidak menyerahkannya kepada AD ART dan mekanisme internal Partai Politik. Begitu pula Pragmatisme dan Oligarki dalam rekrutmen dan lemahnya fungsi representasi diakibatkan sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga perlu revisi Pasal 168, Pasal 420, Pasal 422, Pasal 426, atau penambahan pasal baru UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terlepas sistem pemilu terbuka maupun tertutup Undang-Undang Pemilu harus mencantumkan kandidasi secara rinci dan rigid untuk menghindari pragmatisme dan oligarki.
3. Secara yuridis, oligarki dan pragmatisme Partai Politik dinilai diakibatkan oleh minimnya kehadiran dan kebijakan negara dalam pendanaan Partai Politik. Sehingga diperlukan dukungan dana Partai Politik yang memadai dari negara

dalam menjalankan fungsi representasi dan rekrutmen yang Amanah. Tata Kelola Partai Politik yang Amanah dapat menjamin Partai Politik terbebas dari *rent seeking*, oligarki, dan rekrutmen dengan pendekatan *vote getter*. Dengan demikian diperlukan revisi dan penambahan pasal yang memperkuat pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahkan diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara terperinci dan rigid tentang keuangan atau dana Partai Politik.

4. Secara kelembagaan model Rumah Aspirasi Fungsional perlu diterapkan di tataran Partai, Fraksi, maupun individu Wakil Rakyat, sehingga fungsi-fungsi representasi sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini dapat dikelola secara optimal. Demikian model Lembaga Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen Partai Golkar perlu diaplikasikan melalui pengembangan dan perluasan kelembagaan Golkar Institute. Sehingga prinsip-prinsip rekrutmen sebagaimana hasil penelitian ini dapat diberlakukan secara optimal.
5. Penerapan model “Rumah Aspirasi Fungsional” dan “Lembaga kaderisasi, edukasi dan rekrutmen” perlu diperkuat secara yuridis, sehingga diperlukan revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3 yang mengatur secara rigid dan terperinci pemberlakuan kedua model Lembaga tersebut. Disamping itu diperlukan aturan yang mengatur keterlibatan KPK dalam mengkonstruksi dan menjalankan kedua Lembaga tersebut.
6. Secara akademik, *Good political Party governance* merupakan temuan teori (*theoretical findings*) yang secara teoritik merumuskan ilmu administrasi publik dari perspektif politik. Dimana perspektif ini amat sangat jarang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti administrasi publik. Sehingga penelitian ini dapat menjadi pintu masuk pengembangan keilmuan administrasi publik dalam perspektif politik bagi para peneliti dan ilmuwan administrasi publik di Indonesia maupun internasional.
7. Secara ilmiah belum ada penelitian yang membahas tentang model Lembaga Kaderisasi, Edukasi, dan Rekrutmen Partai Politik secara terintegrasi. sehingga selain dapat diaplikasikan di Partai Politik lain, model ini memerlukan

penelitian lanjutan dalam bentuk *study experimental* maupun bentuk penelitian lainnya di Partai Politik lain, tentunya dengan fokus yang sama terkait fungsi representasi dan rekrutmen.

8. Penelitian disertasi ini belum sempurna, masih banyak fungsi dan aspek lain yang belum tergali dalam penelitian ini. Guna menyempurnakan penelitian ini diperlukan penelitian lanjutan oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan fokus yang sama namun lokus yang berbeda di Partai Politik lainnya. Diperlukan juga penelitian lanjutan terkait semua aspek dan fungsi partai politik dengan lokus dan fokus yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU REFERENSI

- Acemoglu, Daron dan Robinson, James A. 2017. *Why Nations Fail ; the origin of Power, Prosperity, and Power (Mengapa Negara Gagal; Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan)*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- AFDB and ADF. 1999. *Bank Group Policy on Good Governance*. OCOD.
- Alfian, Alfian. 2018. *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia; Esai-Esai Sosial Politik dan Kebudayaan*. Penerbit Penjuru Ilmu. Bekasi.
- Amal, Ichsanul. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bartolini, Stefano and Mair, Peter. 2001. *Challenges to Contemporary Political Parties*, dalam Diamond, Larry dan Gunther, Richard. (ed). 2001. *Political Parties and Democracy*. The John Hopkins University Press.
- Basuki, Johannes. 2018. *Administrasi Publik; telaah teoritis dan empiris*. Jakarta:PT Rajagrafindo persada.
- Botchway, Francis N. 2001. *Good Governance: The Old, The New, The Principle, And the Elements* Florida Journal of International Law Spring.
- Bovaird, Tony dan Loeffler, Elke (eds.). 2016. *Public Management and Governance*. Third Edition. Routledge. New York.
- Bryman, A. 2012. *Social Research Methods*. 4<sup>th</sup>.Ed. United States: Oxford University Press
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Close, Caroline and Sierens, Vivien. 2017. *Increasing Intra-Party Democracy, Blurring the Lines of Representation?*. International Workshop “Democratic Theory Beyond Deliberation: New Approaches to Representative Democracy”, Oxford, 22-23 rd June 2017
- Creswell, John W. 2014. *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Singapore: Sage Publication.

- Creswell, J.W. and Poth, C.N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. 4<sup>th</sup> Edition. Sage Publication, Inc., Thousand Oaks
- Diamond, Larry dan Gunther, Richard. 2001. *Political Parties and Democracy*. The John Hopkins University Press.
- Effendi, Bahtiar,dkk, 2012. *Beringin Membangun membangun: Sejarah Politik Partai Golkar*, Jakarta: Penerbit Grafindo, 2012).
- EIU, T. E. 2020. *Democracy Index 2020: In Sickness and in Health*. London: The Economist Intelligence Unit.
- Ezrow, Natasha M. 2011. *Briefing Paper; The Importance of Parties and Party System Institutionalization in new Democracies*. IDCR.
- Fadhillah, D.N., Ramadhan, F., Dewa, T.T. 2020. *Riset Nagara Institute: Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Nagara Institute, Jakarta
- Farazmand, A. (2018). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer International Publishing.
- Frederickson, S. L. (2016). *The Public Administration Theory Primer (Third Edition)*. Philadelphia: Westview Press.
- George, Siddharth and Ponattu. Dominic. 2018. *Like father, like son? The economic impacts of political dynasties*. Harvard University, Cambridge
- Ghosh and Siddique. 2015. *Corruption, good governance, and Economic development; contemporary analysis and Case Studies*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Grigsby, E. (2012). *Analyzing Politics: An Introduction to Political Science (Fifth Edition)*. Wadsworth: Cengage Learning Inc USA.
- Hakim, Andi. 2016. *Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)*.
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hofmeister, Wilhelm dan Grabow, Karsten. 2011. *Political Parties; Functions and Organization in Democratic Societies*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



- Ishiyama, John. 2015. *Political Parties, Democracy, and "Good Governance"*. Upjohn Institute Press.
- Johnston, Michael. 2005. *Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives; Political Finance Policy, Parties, And Democratic Development*. National Democratic Institute For International Affairs.
- Katz, Richard and Mair, Peter. 2018. *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. Oxford University Press. UK.
- Kartawidjaja, Pipit dan Aminuddin Faishal. 2014. *Demokrasi Elektoral: Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*. Sindikasi Indonesia.
- Kholiq. 2016. *Politik Transaksional di Aras Lokal (Dinamika Rational Choice Masyarakat Muslim pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014)* Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Landman, Todd. 2007. *Developing Democracy: Concepts, Measures, and Empirical Relationships*. International IDEA
- Laoly, Y. (2019). *Manajemen Sengketa Partai Politik: Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negeri Demokrasi*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Latif, Yudi, 2019. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020. *Wawasan Pancasila; Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- Levitsky, Steven dan Ziblatt, Daniel. 2019. *Bagaimana Demokrasi Mati*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mellaz, August dan Kartawidjaja, Pipit R. 2018. *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik; Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia*. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mubah, Safril. 2009. Belajar dari Pemilu Amerika Serikat 2008 untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia. Journal. Unair.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: KPG.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy. 2004. *A Framework for Democratic Party-Building*. NIMD. The Hague.
- Norris, Pippa. 2006. *Recruitment* in R.S Katz and W. Crotty. *Handbook of Party Politics*. Sage Publications London.
- Nurdin, Nurliah. 2019. *Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi Yang Mensejahterakan*. Orasi Pengukuhan Professor Ilmu Politik- Nurliah Nurdin. Jakarta-IPDN Press.
- Overeem, Patrick. 2012. *The Politic-Administration Dichotomy; Toward A Constitutional Perspective*. CRC Press.
- Parkhurst, J. 2017. *The Politics of Evidence From Evidence-Based Policy to The Good Governance of Evidence*. London: Routledge .
- Phillips, Nicola. 2017. *Power and inequality in the global political economy*. Oxford University Press on behalf of The Royal Institute of International Affairs.
- Pidato pengarahan pada rakor teknis bidang pemenangan pemilu Partai Golkar Wilayah Sulawesi Selatan, 25 Januari 2011.
- Pureklolon, Thomas .2019. *Demokrasi dan Politik; Menelisik Dinamika Kekuasaan, sosial, dan dan Pancasila*.
- Rabin, Jack, W. Hildreth. & Gerald, J, Miler. *Handbook of Publik Administration*. New York: Taylor and Francis Group.
- Rivera, Carlos. 2017. *Political Dynasties and Party Strength: Evidence from Victorian Britain*. Institute for Advanced Study in Toulouse
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media
- Rosenbloom, et. all. (2015). *Public Administration; Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education (Eighth Edition).
- Scarrow et.al (Eds). 2017. *Organizing Political Parties; Representation, Participation, and Power*. Oxford University Press.

- Schoultz, Åsa von and Wass, Hanna. 2010. *Styles of Political Representation: What Do Voters Expect?.* Journal of Elections Public Opinion and Parties · Center for the Study of Democracy (CSD), UC Irvine.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V dan Endrayanto, Poly. 2012. *Statistika untuk Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sundaram dan Chowdhury. 2012. *Is Good Governance Good for Development?.* Bloomsbury Academic Published in association with the United Nations
- Suparno, Basuki. 2012. *Reformasi dan jatuhnya soeharto.* Kompas Media Nusantara.
- Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer, Studi Tentang Budaya Politik.* Jakarta LP3ES.
- Sutrisno, Slamet, 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila.* Yogyakarta: Andi
- Szymanek, Jarosław. 2015. *Theory of political Representation.* Peter Lang Edition.
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi.* Jakarta. Gramedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- UNDP. 2011. *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty.* Bureau for Development Policy. UNDP. New York
- Wagner, Richard E. (Ed). 2018. *James M. Buchanan A Theorist of Political Economy and Social Philosophy.* Palgrave Macmillan.
- Warjio, dkk 2020. *Tata Kelola Partai: Bagaimana Partai Politik Bekerja dalam Gelombang Demokrasi?.* Medan: Gerhana Media Kreasi
- \_\_\_\_\_, dkk. 2021. *Good Party Governance. Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.* Gerhana Media Kreasi. Medan.
- Web, S., & White, S. 2007. *Party Politics in New Democracies.* Oxford University Press. New York.

Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. (alih bahasa: Zia Anshor). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wisnumurti, Gede. 2017. Paper : *Democracy Of Pancasila: The Concept And Its Implementation In Indonesia*. Presented in seminar at the University of Queensland Australia.

## JURNAL REFERENSI

Al Rafni dan Aina. 2016. Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik. *Jurnal Analisis Politik*, Vol. 1, No. 2, Maret 2016.

Amiruddin. 2021. *Amanah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol. 11 No. 4 Oktober-Desember 2021 ISSN 2089-5127 (print) | ISSN 2460-0733 (online).

Agung, Ivan M & Husni, Desma. 2016. *Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *Jurnal Psikologi* Volume 43, Nomor 3, 2016: 194 – 206 194.

Aspinall, Edward. (2010). Indonesia: The Irony of Success. *Democracy*, Vol. 21 No. 2.

Bahri, Syaiful. 2022. *An Anomaly in political recruitment: the logic of cross candidacy in 2020 Jambi provincial local election*. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* Vol.4 No.1 ; Hal 111 – 138 ISSN : 2685-6670 ( Online )

Basuki, Johannes. 2021. *Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2) (2021), 160-181

Brata, D.S et.al. 2015. *Parlemen Korea Selatan dan Legislasi Nasional*. *CEPP UI*. Parlementaria edisi 127 TH. XLV, 2015

Dalimunthe, Reza P. 2016. *Amanah dalam Perspektif Hadis*. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, 1 (September 2016): 7-16.

Daniarsyah, Dida. 2015. *Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* □ Volume V No. 2 / Desember 2015

Faisal, Barid, Bariroh & Didik Mulyanto. 2018. *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*. *Jurnal Integritas*, Vol.4 No. 1 – Juni 2018

- Fatimah. 2019. *Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)*. Aal-Riwayah: Jurnal Kependidikan Volume 11, Nomor 1, April 2019, 123-146. ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p)
- Fitriyah. 2020. *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik. Vol.11, No. 1, 2020. doi: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17
- International IDEA dan IRGI. 2018. *Political Parties and Natural Resource Governance; A Practical Guide for Developing Resource Policy Positions*. IDEA and IRGI. ISBN: 978-91-7671-146-0
- Junaidi. 2020. *Recruitment/Kaderization Function of Political Party in Local Election with Single Candidate*. Melayunesia Law: Vol. 4, No. 1, June (2020), 56-74.
- Kholis, N. (2013). Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *Millah, Vol. XIII, No. 1*, 189-190.
- Piech, Krzysztof. 2015. *Political Economy an Introduction to the Theory of Economic Policy*. Publisher: Szkoła Główna Handlowaw Warszawie (SGH). ISBN: 978-83-65416-50-6
- Ristyawati, Aprista. 2019. "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi. *Administrative Law & Governance*". Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019
- Romli, Lili. 2008. Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik, LIPI. Vol.5.No.1*. Copyright.2016
- Sekaran, U & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 7<sup>th</sup> Edition. Wiley and Sons, West Sussex
- Sudjito, Gatot. 2013. Negara dan Golkar: Studi Tentang Konfigurasi Politik Tahun 1971-2009. *DIA-Jurnal Administrasi Publik, Desember 2013, Vol.11 No. 2: 215-225*
- Syaukani, Ghiffari Asy- & Fitriyah. 2020. Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi: Studi Kasus di DPP Partai Golkar. *Journal of Politic and Government Studies, Vol. 9 No. 03, pp.111-120*
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Manurung, Mandala. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Prisma, Vol. 33, No. 2, 2014.
- Tosika, Metrina, Fahmi, Khairul, dan Asrinaldi. 2020. *Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik*. Jurnal Administrasi dan

Kebijakan Publik ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 | DOI: 10.25077/jakp

Webb. Scarrow dan Poguntke. 2019. *Party organization and satisfaction with democracy: inside the blackbox of linkage*. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties. ISSN 1745-7289

Yanuarti, Sri. 2019. Pendanaan Negara Kepada Partai Politik; Pengalaman Beberapa Negara. Jurnal Penelitian Politik. Volume 16. No. 2

## WEBSITE

Faiz, Ahmad. 2017. *Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat*. Jakarta: *tempo.co* (<https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat>, diakses 09/09/2022, 22.14 WIB).

International Association for Public Participation Indonesia. (2022). *Spektrum Partisipasi Publik dalam Proses Pengesahan RUU IKN*. [Spektrum Partisipasi Publik dalam Proses Pengesahan RUU IKN \(iap2.or.id\)](https://spektrum-partisipasi-publik-dalam-proses-pengesahan-ruu-ikn-iap2.or.id). Diakses 23/11/2022, 18.02 Wib

Kontan.co.id. (2022). *Pembentukan UU IKN Dinilai Cepat, Ini Pembelaan Pemerintah*. [Pembentukan UU IKN Dinilai Cepat, Ini Pembelaan Pemerintah \(kontan.co.id\)](https://kontan.co.id). Diakses, 23/11/2022, 14.00 Wib

KPK. (2021, January 1). *kpk.go.id*. Retrieved from tpk berdasarkan profesi/jabatan: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Mahkamah Konstitusi. (2021) *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Dua Tahun*. [MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://mkri.id). Diakses, 23/11/2022, 14.00 Wib

Merdeka.com. (2022). Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari. [Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari | merdeka.com](https://merdeka.com). Diakses, 23/11/2022, 14.00 Wib

Prof. Dr. Muzakir, MA. Konsep Amanah Dalam Al-Quran.  
[https://www.academia.edu/67783686/Konsep Amanah Dalam Al Quran](https://www.academia.edu/67783686/Konsep_Amanah_Dalam_Al_Quran)  
Diakses, 20/12/2022, 13.00 Wib.

Wahyu, Yohan. 2022. *Memahami identitas kepartaian dan pemilih partai*.  
<https://www.kompas.id/baca/opini-publik/2022/02/22/memahami-identitas-kepartaian-dan-pemilih-partai> (diakses, 13/09/2022, 21:55 WIB).

## **PERUNDANG-UNDANGAN DAN DRAFT**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)

TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD.

Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VIII/Munas-X/Golkar/2019

Draft Laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar Periode 2004-2009

Draft Hasil Musyawarah Nasional X DPP Partai Golkar Tahun 2019.

Draft Laporan Pertanggungjawaban DPP partai Golkar, Masa bakti 2014-2019,